

Katalog BPS : 9302002.33

**PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
JAWA TENGAH
2010-2014**

<https://jateng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
JAWA TENGAH
2010-2014**

<https://jateng.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
JAWA TENGAH
2010- 2014**

ISBN : 978-602-0916-36-2
Nomor Publikasi : 33550.1506
Katalog BPS : 9302002.33
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : ix + 81 halaman

Naskah :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis

Gambar Kulit :

Subdirektorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran, BPS RI

Diterbitkan Oleh :

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Drs. Ibram Syahboedin, MA

Penanggung Jawab :

Syarifuddin Nawie, S.Si. ME

Penyunting :

Syarifuddin Nawie, S.Si. ME

Ir. Rizkie Arumingtyas, MM

Penulis:

Ir. Endang Widowati

<https://jateng.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu : (i) pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), (ii) pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*), dan (iii) pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Semarang, Juli 2015

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Provinsi Jawa Tengah,



 Drs. Ibram Syahboedin, MA

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
B. Kegunaan Statistik PDRB.....	4
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	7
A. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)	9
B. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PKLNPRT)	12
C. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP)	15
D. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	17
E. Perubahan Inventori	22
F. Ekspor Impor Barang dan Jasa	26
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN JAWA TENGAH BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2014	29
A. Tinjauan Agregat PDRB Jawa Tengah menurut Pengeluaran	31
B. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	36
C. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	39
D. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	40
E. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	42
F. Perkembangan Perubahan Inventori	44
G. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	45
H. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	46
I. Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	49

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2014	51
	A. PDRB (Nominal)	53
	B. Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	54
	C. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB	55
	D. Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	56
	E. Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	56
	F. Perbandingan PDRB terhadap Impor	57
	G. Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	58
	H. Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	59
	I. Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	60
	J. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	61
BAB V	PENUTUP	63
	LAMPIRAN	67
	DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2010-2014 (<i>Miliar Rp</i>)	31
Tabel 2. PDRB Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2010-2014 (<i>Miliar Rp</i>)	32
Tabel 3. Distribusi PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2010-2014 (<i>Persen</i>)	33
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2011-2014(<i>Persen</i>)	35
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2010-2014 (<i>Persen</i>)	35
Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2010-2014	36
Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2010-2014 (<i>Persen</i>)	38
Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2011-2014 (<i>Persen</i>).....	38
Tabel 9. Pertumbuhan Indeks Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2011-2014 (<i>Persen</i>)	39
Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPR T Tahun 2010-2014	40
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2010-2014	41
Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2010-2014	42
Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB Tahun 2010-2014	43
Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Tahun 2010-2014 ...	44
Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Tahun 2010-2014 .	46
Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Tahun 2010-2014 ..	47
Tabel 17. Perkembangan Ekspor dan Impor Antar Daerah Tahun 2010-2014	50
Tabel 18. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Tahun 2010-2014	53
Tabel 19. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2010-2014	54

Tabel 20. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2010-2014	55
Tabel 21. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Tahun 2010-2014	56
Tabel 22. Rasio Ekspor terhadap PMTB Tahun 2010-2014	57
Tabel 23. Rasio PDRB terhadap Impor Tahun 2010-2014	58
Tabel 24. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Tahun 2010-2014	58
Tabel 25. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Tahun 2010-2014	60
Tabel 26. Rasio Perdagangan Internasional Tahun 2010-2014	61
Tabel 27. Incremental Capital Output Ratio Tahun 2010-2014	62

<https://jateng.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Perbandingan PDRB Adh Berlaku dan Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2010-2014.....	33
Grafik 2. Perbandingan Distribusi PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2010 dan Tahun 2014	34
Grafik 3. Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran 2011-2014 (<i>Persen</i>) ..	45
Grafik 4. Pertumbuhan Ekspor dan Impor Luar Negeri Tahun 2011-2014	48

<https://jateng.bps.go.id>

<https://jateng.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (<i>Juta Rupiah</i>)	69
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (<i>Juta Rupiah</i>)	70
Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (<i>Persen</i>).....	71
Lampiran 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (<i>Persen</i>).....	72
Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (<i>Persen</i>).....	73
Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (<i>Persen</i>).....	74
Lampiran 7. Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran (<i>Persen</i>).....	75
Lampiran 8. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun 2010=100) menurut Pengeluaran (<i>Persen</i>).....	76
Lampiran 9. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Tahun 2010=100) (<i>Persen</i>)	77
Lampiran 10. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (Tahun 2010=100) (<i>Persen</i>)	78

BAB I

PENDAHULUAN

<https://jateng.bps.go.id>

<https://jateng.bps.go.id>

A. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 yang diharapkan dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1. Pendekatan Produksi,

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,

17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/*daerah/region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran,

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto.

B. KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/*daerah/region*. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, atau setiap sektor, dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/*daerah/region*. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/*daerah/region*.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran dapat menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/*luar wilayah*.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
7. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://jateng.bps.go.id>

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://jateng.bps.go.id>

<https://jateng.bps.go.id>

A. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 (dua belas) COICOP tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).
- Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas, menghasilkan besarnya PKRT adh Berlaku. PKRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara *men-deflate* PKRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok COICOP,
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-adjust;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;;
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

B. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT (PKLNPRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;

- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud di sini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPR) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan; pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPRRT adalah :

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PKLNPRRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRRT adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PKLNPRRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- b. Mengestimasi PKLNPRRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRT adh Berlaku. PKLNPRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara *men-deflate* PKLNPRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

C. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya

seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.

- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; dan PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

2. Metode Penghitungan

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

PK-P adh Berlaku=

Output non pasar–penjualan barang dan jasa + Output Bank Indonesia

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

D. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang

modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi; reklamasi pantai; pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan; serta pencegahan banjir dan erosi).

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah :

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga (level provinsi).
- Laporan keuangan perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.
- Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai

atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi

jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“*deflate*” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan antara lain nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

E. PERUBAHAN INVENTORI

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori

menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait, dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian.

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh

Berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan, bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

F. EKSPOR IMPOR BARANG DAN JASA

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi ekspor impor adalah :

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://jateng.bps.go.id>

BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN JAWA TENGAH
BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2010 - 2014

<https://jateng.bps.go.id>

<https://jateng.bps.go.id>

Perubahan struktur ekonomi Provinsi Jawa Tengah akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2010 sampai dengan 2014, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Jawa Tengah digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

A. TINJAUAN AGEGAT PDRB JAWA TENGAH MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Jawa Tengah menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang tetap menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB atas dasar harga (adh) Berlaku dan atas dasar harga (adh) Konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB.

**Tabel 1. PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2014
(Miliar Rp)**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	389 637,55	429 912,44	474 886,73	534 427,98	592 695,60
2. Konsumsi LNPRT	6 449,53	6 968,24	7 936,19	9 260,13	10 773,17
3. Konsumsi Pemerintah	49 467,50	55 282,98	61 581,49	69 276,18	76 604,18
4. PMTB	175 032,48	198 421,41	227 585,70	242 163,57	273 585,23
5. Perubahan Inventori	9 221,01	33 248,70	53 600,00	44 273,89	27 054,49
6. Ekspor	214 844,44	238 936,07	260 959,26	305 627,18	339 604,46
7. Impor	221 427,89	270 208,21	332 019,93	372 075,35	394 654,44
Total PDRB	623 224,62	692 561,63	754 529,44	832 953,58	925 662,69

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB Jawa Tengah adh Berlaku selama periode tahun 2010 sampai dengan 2014 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

**Tabel 2. PDRB Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2014
(Miliar Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	389 637,55	408 124,84	427 335,44	445 644,95	464 155,19
2. Konsumsi LNPRT	6 449,53	6 734,34	7 126,94	7 640,86	8 299,37
3. Konsumsi Pemerintah	49 467,50	50 925,20	52 571,85	55 431,42	56 904,04
4. PMTB	175 032,48	187 096,82	202 328,21	211 220,47	220 009,44
5. Perubahan Inventori	9 221,01	35 727,93	36 462,12	21 017,82	16 261,49
6. Ekspor	214 844,44	205 730,92	230 028,64	256 229,05	251 212,00
7. Impor	221 427,89	238 071,93	264 510,09	270 284,86	250 569,77
Total PDRB	623 224,62	656 268,13	691 343,12	726 899,71	766 271,77

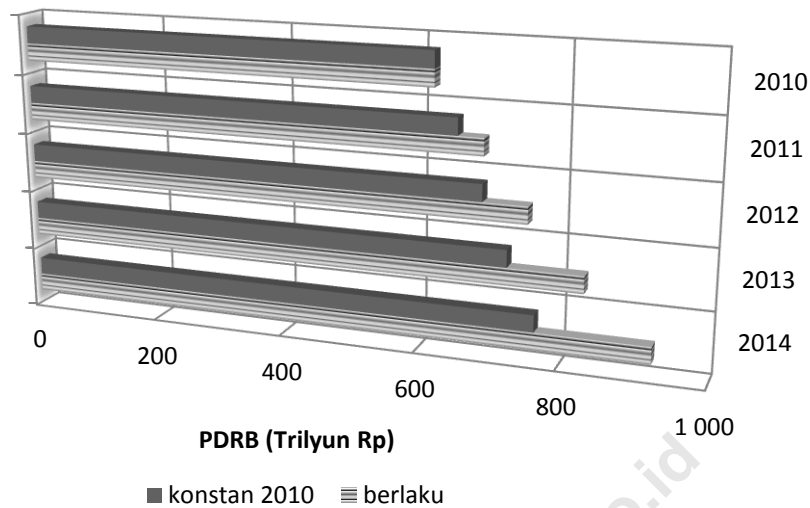
* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selain dinilai adh Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh Konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2010–2014, gambaran tentang perkembangan ekonomi Jawa Tengah berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada Tabel 2 di atas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Dari grafik berikut, nampak bahwa nilai PDRB adh Berlaku lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh harga telah ditiadakan.

Grafik 1. Perbandingan PDRB Adh Berlaku dan Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2010-2014



Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 3. Distribusi PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2010 – 2014 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	62,52	62,08	62,94	64,16	64,03
2. Konsumsi LNPRT	1,03	1,01	1,05	1,11	1,16
3. Konsumsi Pemerintah	7,94	7,98	8,16	8,32	8,28
4. PMTB	28,08	28,65	30,16	29,07	29,56
5. Perubahan Inventori	1,48	4,80	7,10	5,32	2,92
6. Ekspor	34,47	34,50	34,59	36,69	36,69
7. Impor	35,53	39,02	44,00	44,67	42,63
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

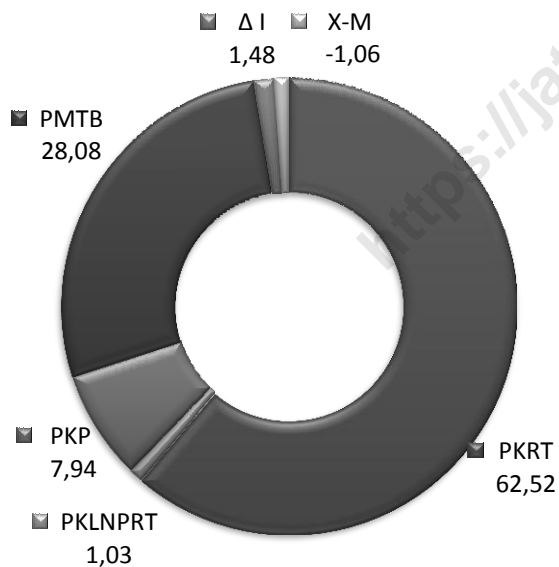
** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3 di atas terlihat bahwa selama periode 2010 – 2014, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 60 persen).

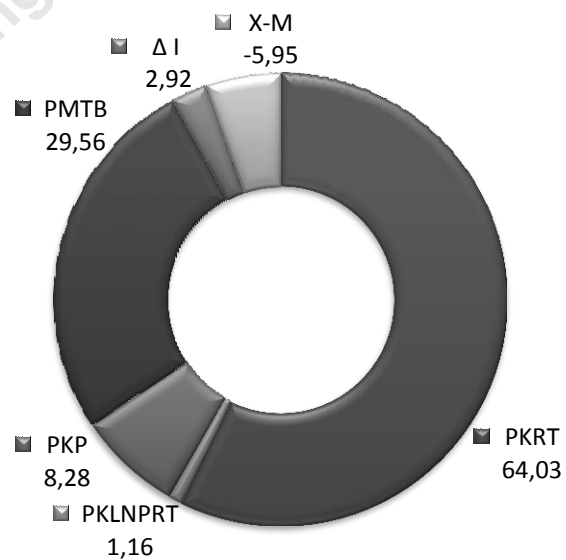
Ekspor dan Impor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 34 - 37 persen produk Jawa Tengah diperdagangkan ke luar daerah, baik ke luar negeri maupun ke provinsi lain di Indonesia. Demikian halnya dengan impor mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 35 - 45 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Pengeluaran untuk kapital (PMTB) memberi kontribusi sekitar 28 - 30 persen, sedangkan kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 7,94 - 8,32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Pada tahun 2010-2014 perdagangan Jawa Tengah yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor, yang berarti bahwa perdagangan Jawa Tengah selalu menunjukkan posisi “defisit”.

**Grafik 2. Perbandingan Distribusi PDRB menurut Pengeluaran
Tahun 2010 dan Tahun 2014**

Distribusi PDRB Pengeluaran 2010 (Persen)



Distribusi PDRB Pengeluaran 2014 (Persen)



X-M : Ekspor Neto
Δ I : Perubahan Inventori

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jawa

B. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data pada Tabel 6 menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Dalam kurun waktu 2010 - 2014 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	389 637,55	429 912,44	474 886,73	534 427,98	592 695,60
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	389 637,55	408 124,84	427 335,44	445 644,95	464 155,19
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	62,52	62,08	62,94	64,16	64,03
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	44 762,86	48 875,16	53 543,57	59 778,71	65 788,66
b. ADHK 2010	44 762,86	46 398,21	48 182,16	49 847,84	51 520,80
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	12 032,29	13 136,97	14 391,08	16 066,09	17 680,45
b. ADHK 2010	12 032,29	12 471,20	12 950,07	13 397,08	13 846,01
Pertumbuhan ¹⁾ (% ADHK)					
a. Total konsumsi RT	-	4,74	4,71	4,28	4,15
b. Per-RT	-	3,65	3,84	3,46	3,36
c. Perkapita	-	3,65	3,84	3,45	3,35
Jumlah RT (unit)	8 704 482	8 796 133	8 869 164	8 940 106	9 009 084
Jumlah penduduk (000 org)	32 382,66	32 725,38	32 998,69	33 264,34	33 522,66

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹⁾Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2010 s.d 2014 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 64,16 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 62,08 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami

masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik maupun yang berasal dari impor turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita terus meningkat dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2010 konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 12,03 juta rupiah, yang artinya setiap penduduk Jawa Tengah rata-rata mengeluarkan biaya sebesar 12,03 juta rupiah selama setahun untuk konsumsi, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain). Pengeluaran tersebut terus meningkat setiap tahun dan tahun 2014 rata-rata konsumsi per kapita sebesar 17,68 juta.

Apabila dilihat menurut harga konstan, pertumbuhan konsumsi per kapita berada pada kisaran 3,35-3,84 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 3,84 persen dan terendah sebesar 3,35 persen pada tahun 2014. Pertumbuhan konsumsi per kapita setiap tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk Jawa Tengah meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas).

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan sebesar 4,74 persen pada tahun 2011. Kemudian, menurun pada tiga tahun berikutnya yaitu berturut-turut sebesar 4,71 persen (2012), 4,28 persen (2013) dan 4,15 persen (2014). Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 1 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 7 di bawah, memperlihatkan struktur penggunaan konsumsi akhir rumah tangga. Dari tabel tersebut nampak 3 (tiga) konsumsi yang peranannya paling besar, yaitu yang terbesar konsumsi makanan, minuman dan rokok, konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya; serta konsumsi perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga.

**Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2010 – 2014¹⁾
(Persen)**

Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	41,29	40,29	39,83	39,56	38,45
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,69	4,72	4,30	3,95	3,87
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,56	12,64	12,67	12,58	12,81
d. Kesehatan & Pendidikan	7,89	7,75	7,74	7,39	7,43
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	24,22	25,18	25,93	27,20	27,71
f. Hotel & Restoran	7,70	7,51	7,46	7,40	7,86
g. Lainnya	1,64	1,90	2,06	1,92	1,85
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹⁾Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

Dari ketiga kelompok konsumsi terbesar tersebut, konsumsi makanan, minuman dan rokok pertumbuhannya relatif rendah setiap tahun, sangat berbeda dengan pertumbuhan kelompok perumahan dan transportasi yang cukup tinggi di setiap tahunnya. Pada tahun 2014 konsumsi perumahan tumbuh 6,20 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya, sedangkan konsumsi transportasi tumbuh 6,14 persen, melambat dibanding pertumbuhan tahun 2013.

**Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2011 – 2014
(Persen)**

Kelompok Konsumsi	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	0,53	0,97	1,28	1,16
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,28	5,00	3,80	4,56
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,52	5,46	5,19	6,20
d. Kesehatan & Pendidikan	5,65	5,53	5,51	3,96
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	11,06	9,09	7,50	6,14
f. Hotel & Restoran	2,75	5,46	4,41	7,75
g. Lainnya	20,85	11,25	8,73	5,20
Konsumsi Akhir Rumah Tangga	4,74	4,71	4,28	4,15

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Tahun 2010 – 2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	6 449,53	6 968,24	7 936,19	9 260,13	10 773,17
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	6 449,53	6 734,34	7 126,94	7 640,86	8 299,37
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,03	1,01	1,05	1,11	1,16
Pertumbuhan (% ADHK)	-	4,42	5,83	7,21	8,62
* <i>Angka Sementara</i>		** <i>Angka Sangat Sementara</i>			

Dari tabel di atas, dapat dilihat pertumbuhan konsumsi LNPRT dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Pertumbuhan tahun 2013 dan 2014 meningkat cukup tinggi, yang salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran ormas, parpol, LSM dan lembaga lainnya karena adanya pemilihan kepala daerah (bupati/walikota dan gubernur) pada tahun 2013 dan pemilihan umum (legislatif) serta pemilihan presiden pada tahun 2014.

D. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian provinsi Jawa Tengah serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2010 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 49,47 triliun rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2014 nilainya mencapai 76,60 triliun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami peningkatan, dari 7,94 persen ditahun 2010 menjadi 8,28 persen pada tahun 2014. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2010; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2013 yang mencapai 8,32 persen.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	49 467,50	55 282,98	61 581,49	69 276,18	76 604,18
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	49 467,50	50 925,20	52 571,85	55 431,42	56 904,04
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	7,94	7,98	8,16	8,32	8,28
Konsumsi Pemerintah per- kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	1 527,59	1 689,30	1 866,18	2 082,60	2 285,15
b. ADHK 2010	1 527,59	1 556,14	1 593,15	1 666,39	1 697,48
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (Ribu Rp)					
a. ADHB	99,69	115,02	132,69	155,87	169,74
b. ADHK 2010	99,69	105,96	113,28	124,72	126,09
Pertumbuhan ¹⁾					
a. Total konsumsi pemerintah	-	2,95	3,23	5,44	2,66
b. Konsumsi perkapita	-	1,87	2,38	4,60	1,87
c. Konsumsi per-pegawai	-	6,28	6,91	10,10	1,09
Jumlah Pegawai Pemerintah ²⁾	496 025	480 629	464 108	444 442	451 310
Jumlah penduduk (000 org)	32 382,66	32 725,38	32 998,69	33 264,34	33 522,66

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹⁾Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010

²⁾Tidak termasuk polisi dan militer

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per kapita adh Berlaku sebesar 1,53 juta rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2014 konsumsi pemerintah per kapita sebesar 2,28 juta rupiah.

Konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per kapita maupun per pegawai). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Dalam kurun waktu 2011-2014, pertumbuhan konsumsi pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2013, sebesar 5,44 persen, dan terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 2,66 persen. Kondisi yang hampir sama terjadi pada

pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita dan konsumsi pemerintah per pegawai, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar (4,60 persen dan 10,10 persen) serta terendah tahun 2014 (1,87 persen dan 1,09 persen).

Secara struktur, pengeluaran konsumsi pemerintah dibedakan menjadi konsumsi kolektif dan konsumsi individu. Data pada Tabel 12 memperlihatkan bahwa proporsi antara kedua jenis konsumsi ini di Jawa Tengah hampir berimbang, rata-rata 49 persen untuk konsumsi kolektif dan 51 persen untuk konsumsi individu. Secara nominal, kedua pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan konsumsi individu secara riil berfluktuasi, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,27 persen dan terendah tahun 2014 sebesar 2,00 persen. Demikian juga dengan pertumbuhan konsumsi kolektif yang cukup berfluktuasi, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,62 persen, sedangkan terendah pada tahun 2012 sebesar 1,86 persen.

Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir Pemerintah ¹⁾					
a. Konsumsi Kolektif (Miliar Rp)	24 480,66	27 041,48	29 973,96	34 585,18	37 379,63
(%)	49,49	48,91	48,67	49,92	48,80
b. Konsumsi Individu (Miliar Rp)	24 986,84	28 241,50	31 607,53	34 691,01	39 224,55
(%)	50,51	51,09	51,33	50,08	51,20
Total Konsumsi (Miliar Rp)	49 467,50	55 282,98	61 581,49	69 276,18	76 604,18
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan (% ADHK2010)					
a. Konsumsi Kolektif	-	2,24	1,86	5,62	3,35
b. Konsumsi Individu	-	3,64	4,56	5,27	2,00
Total Konsumsi	-	2,95	3,23	5,44	2,66
Pertumbuhan indeks implisit ²⁾ (%)					
a. Konsumsi Kolektif	-	8,04	8,82	9,24	4,58
b. Konsumsi Individu	-	9,05	7,03	4,26	10,85
Total Konsumsi	-	8,56	7,90	6,69	7,72

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹⁾Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

²⁾Tingkat perubahan harga produk konsumsi

E. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang

direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)². Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect-input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2010 - 2014 melambat dari 6,89 persen (2011) menjadi 4,16 persen (2014). PMTB dalam bentuk bangunan memberikan proporsi lebih besar dibanding non-bangunan dalam pembentukan modal tetap bruto. Rata-rata perbandingan antara kedua komponen ini adalah 85 persen untuk PMTB bangunan dan 15 persen untuk non-bangunan.

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB
Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	175 032,48	198 421,41	227 585,70	242 163,57	273 585,23
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	175 032,48	187 096,82	202 328,21	211 220,47	220 009,44
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	28,08	28,65	30,16	29,07	29,56
Struktur PMTB ¹⁾					
a. Bangunan (Miliar Rp)	153 501,45	169 773,75	189 641,50	201 050,60	230 357,92
(%)	87,70	85,56	83,33	83,02	84,20
b. NonBangunan (Miliar Rp)	21 531,03	28 647,66	37 944,19	41 112,96	43 227,31
(%)	12,30	14,44	16,67	16,98	15,80
Total PMTB (Miliar Rp)	175 032,48	198 421,41	227 585,70	242 163,56	273 585,23
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ²⁾ (%)					
a. Bangunan	-	3,37	4,57	5,05	6,49
b. Non Bangunan	-	32,00	28,06	1,40	-6,86
Total PMTB	-	6,89	8,14	4,39	4,16

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹⁾Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

²⁾Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010

²⁾Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Dari sisi pertumbuhan adh Konstan, pertumbuhan PMTB bangunan lebih stabil setiap tahunnya, dan selama lima tahun ini berada pada kisaran 3,37 – 6,49 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014. Pertumbuhan PMTB *non*-bangunan sangat fluktuatif, tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 32,00 persen dan terendah pada tahun 2014 yang mengalami kontraksi pertumbuhan 6,86 persen.

F. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Tahun 2010 – 2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	9 221,01	33 248,70	53 600,00	44 273,89	27 054,49
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	9 221,01	35 727,93	36 462,12	21 017,82	16 261,49
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	1,48	4,80	7,10	5,32	2,92

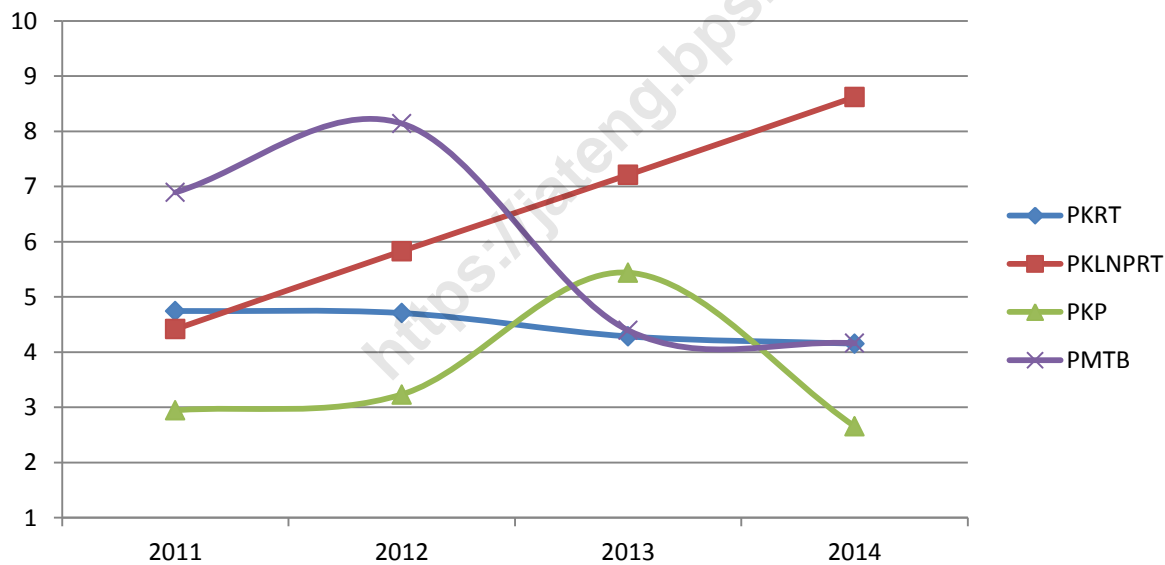
* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi, dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 proporsinya sebesar 1,48 persen, terendah dalam kurun waktu 2010-2014, dan tertinggi sebesar 7,10 persen pada tahun 2012. Proporsi perubahan inventori pada tahun 2014 sebesar 2,92 persen.

Grafik 3. Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran 2011-2014 (Persen)



G. PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri
Tahun 2010 - 2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	43 652,54	51 428,48	56 418,97	70 362,20	83 686,75
ADHK 2010 (Miliar Rp)	43 652,54	49 680,05	53 707,48	61 923,62	67 834,65
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	7,00	7,43	7,48	8,45	9,04
Struktur Ekspor ¹⁾					
a. Barang (Miliar Rp)	42 333,42	49 929,54	54 602,52	68 491,76	82 143,10
(%)	96,98	97,09	96,78	97,34	98,16
b. Jasa (Miliar Rp)	1 319,12	1 498,94	1 816,45	1 870,44	1 543,64
(%)	3,02	2,91	3,22	2,66	1,84
Total ekspor (%)	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ²⁾					
- Barang	-	13,91	7,90	16,06	10,48
- Jasa	-	10,59	14,84	-8,40	-27,07
Total ekspor	-	13,81	8,11	15,30	9,55

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹⁾Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku(ADHB)

²⁾Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010

Pertumbuhan ekspor jasa luar negeri sangat fluktuatif, seperti terlihat pada Tabel 15 di atas, pada tahun 2014 terjadi kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam yaitu sebesar - 27,07 persen, terendah selama periode 2011-2014. Sedangkan pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2012 sebesar 14,84 persen.

H. PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia, sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB pengeluaran dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha.

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari *non residen*. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Jawa Tengah terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Jawa Tengah di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

**Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri
Tahun 2010 - 2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	97 675,34	126 705,98	146 745,41	186 800,83	220 421,20
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	97 675,34	105 571,11	112 615,21	127 813,41	118 498,48
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	15,67	18,30	19,45	22,43	23,81
Struktur Impor ¹⁾ (% ADHB)					
a. Barang (<i>Miliar Rp</i>)	94 790,89	123 181,01	142 795,01	181 733,89	214 880,71
(%)	97,05	97,22	97,31	97,29	97,49
b. Jasa (<i>Miliar Rp</i>)	2 884,45	3 524,97	3 950,40	5 066,94	5 540,49
(%)	2,95	2,78	2,69	2,71	2,51
Total impor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ²⁾					
Barang	-	7,63	6,82	13,52	-7,37
Jasa	-	23,01	2,50	12,79	-4,85
Total impor	-	8,08	6,67	13,50	-7,30

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹⁾ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

²⁾ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010

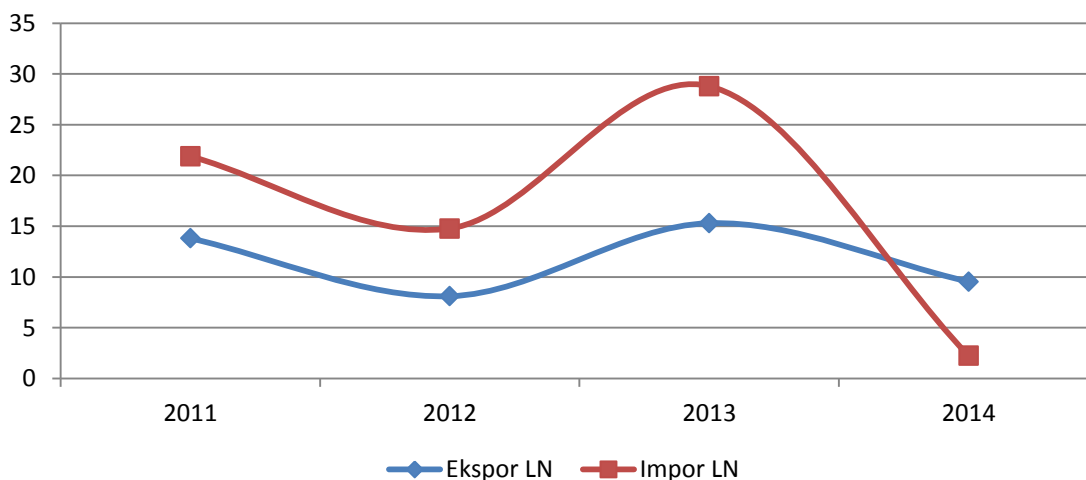
Tabel 16 di atas menunjukkan bahwa nilai impor luar negeri Jawa Tengah adh Berlaku selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan nilai ini mencapai 220,42 triliun rupiah pada tahun 2014. Bila dibandingkan dengan impor tahun 2010 sebesar 97,68 triliun rupiah, nilai impor tahun 2014 mencapai 2,26 kalinya. Dilihat dari sisi harga konstan, pertumbuhan impor luar negeri Jawa Tengah cukup fluktuatif, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 13,50 persen. Meskipun tahun 2014 nilai impor adh Berlaku

meningkat dibanding tahun sebelumnya, tetapi tidak demikian bila dihitung menurut harga konstan. Pada tahun ini nilai impor adh Konstan lebih kecil dibanding tahun 2013 dan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 7,30 persen, yang merupakan pertumbuhan terendah selama periode 2010-2014. Sebagai gambaran, pada tahun 2014 nilai tukar rupiah terhadap USD melemah, yang berdampak langsung terhadap kenaikan harga barang-barang impor.

Seiring dengan peningkatan nominal impor setiap tahun, proporsi impor luar negeri terhadap PDRB juga meningkat. Pada tahun 2014 peranan impor luar negeri mencapai 23,81 persen, jauh lebih tinggi dibanding kondisi tahun 2010 sebesar 15,67 persen. Hal ini menunjukkan ketergantungan ekonomi Jawa Tengah terhadap produk-produk impor luar negeri semakin meningkat. Produk impor dari luar negeri diantaranya dalam bentuk bahan baku untuk keperluan industri manufaktur, barang modal dan barang-barang konsumsi.

Komposisi impor luar negeri didominasi oleh dalam bentuk barang yang mencapai 97 persen, sedangkan sisanya berupa impor dalam bentuk jasa. Dengan demikian perkembangan impor barang memberi pengaruh utama terhadap impor luar negeri secara keseluruhan. Pertumbuhan impor jasa luar negeri juga sangat berfluktuasi, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 23,01 persen dan terendah pada tahun 2014. Pada tahun ini impor luar negeri mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,85 persen.

**Grafik 4. Pertumbuhan Ekspor dan Impor Luar Negeri
Tahun 2011-2014**



I. PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB tahun dasar 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda "**positif**" berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross-hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitungan ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output "bayangan". Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Dari tabel berikut dapat dilihat gambaran ekspor dan impor antar daerah, yaitu ekspor Jawa Tengah ke provinsi lain serta impor dari provinsi lain ke Jawa Tengah. Terlihat bahwa nilai ekspor antar daerah selalu lebih besar dibanding nilai impornya, sehingga net ekspor antar daerah selalu positif dari tahun ke tahun.

**Tabel 17. Perkembangan Ekspor dan Impor Antar Daerah
Tahun 2010 - 2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor dan Impor (ADHB)					
a. Ekspor (<i>Miliar Rp</i>)	171 191,91	187 507,59	204 540,29	235 264,97	255 917,72
b. Impor (<i>Miliar Rp</i>)	123 752,56	143 502,23	185 274,52	185 274,52	174 233,24
Net Ekspor (<i>Miliar Rp</i>)	47 439,35	44 005,36	19 265,76	49 990,45	81 684,48
Nilai Ekspor dan Impor (ADHK)					
a. Ekspor (<i>Miliar Rp</i>)	171 191,91	156 050,87	176 321,16	194 305,43	183 377,35
b. Impor (<i>Miliar Rp</i>)	123 752,56	132 500,82	151 894,88	142 471,44	132 071,29
Net Ekspor (<i>Miliar Rp</i>)	47 439,35	23 550,04	24 426,28	51 833,99	51 306,06

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

<https://jateng.bps.go.id>

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
MENURUT PENGELUARAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2010 - 2014

<https://jateng.bps.go.id>

<https://jateng.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

A. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

Tabel 18. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Tahun 2010 – 2014

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	623 224,62	692 561,63	754 529,44	832 953,58	925 662,69
- ADHK 2010	623 224,62	656 268,13	691 343,12	726 899,71	766 271,77
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	19 209,31	21 162,83	22 865,43	25 040,44	27 613,04
- ADHK 2010	19 209,31	20 053,80	20 950,62	21 852,22	22 858,32
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	-	4,40	4,47	4,30	4,60
Jumlah penduduk (000 org)	32 382,66	32 725,38	32 998,69	33 264,34	33 522,66
Pertumbuhan	-	0,87	0,84	0,81	0,78

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 18), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan

bahwa secara ekonomi setiap penduduk Jawa Tengah rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 4 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 0,8 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan perkapita tersebut tidak saja terjadi secara kuantitas tetapi juga terjadi secara kualitas

B. PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Jawa Tengah (sekitar 60 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Jawa Tengah sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 19. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2010 – 2014

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	389 637,55	429 912,44	474 886,73	534 427,98	592 695,60
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	214 844,44	238 936,07	260 959,26	305 627,18	339 604,46
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,81	1,80	1,82	1,75	1,75

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 1,81 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan

konsumsi akhir rumah tangga. Dari tahun ke tahun rasio ini relatif stabil dan justru mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014 menjadi 1,75. Hal ini lebih disebabkan peningkatan nilai ekspor yang cukup tinggi di tahun-tahun tersebut. Di sisi lain, meskipun konsumsi rumah tangga meningkat setiap tahun, namun kenaikannya tidak setajam kenaikan ekspor. Secara implisit data tersebut menjelaskan, bahwa baik nilai konsumsi akhir rumah tangga maupun ekspor meningkat dari tahun ke tahun dan peningkatan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga.

C. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Jawa Tengah digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 20. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2010 – 2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	389 637,55	429 912,44	474 886,73	534 427,98	592 695,60
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	175 032,48	198 421,41	227 585,70	242 163,56	273 585,23
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	2,23	2,17	2,09	2,21	2,17

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Rata-rata rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB selama lima tahun terakhir sebesar 2,2. Hal ini dapat diartikan penggunaan produk untuk konsumsi rumah tangga 2,2 kali lebih besar dibanding untuk PMTB. Nilai ini cenderung stabil selama lima tahun terakhir, namun pada tahun 2012 terjadi penurunan rasio dari 2,17 pada tahun 2011 menjadi 2,09. Penurunan tersebut lebih disebabkan peningkatan nilai PMTB yang cukup besar di tahun tersebut.

D. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 21. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	389 637,55	429 912,44	474 886,73	534 427,98	592 695,60
b. LNPRT	6 449,53	6 968,24	7 936,19	9 260,13	10 773,17
c. Pemerintah	49 467,50	55 282,98	61 581,49	69 276,18	76 604,18
Jumlah	445 554,58	492 163,66	544 404,42	612 964,30	680 072,95
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	623 224,62	692 561,63	754 529,44	832 953,58	925 662,69
Proporsi	71,49	71,06	72,15	73,59	73,47

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lebih dari 70 persen produk barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Jawa Tengah digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Proporsi ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dari 71,49 persen pada tahun 2010 menjadi 73,47 persen pada tahun 2014. Sedangkan produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir, yaitu PMTB dan ekspor memiliki peran yang relatif kecil, sebesar kurang dari 30 persen.

E. PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri (dalam hal ini termasuk ekspor ke provinsi lain di luar wilayah Jawa Tengah). Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk

menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Total nilai ekspor Jawa Tengah lebih besar dibanding nilai PMTB, sehingga rasionya lebih dari 1. Rata-rata rasio ekspor terhadap PMTB selama lima tahun terakhir sebesar 1,25. Nilai rasio ini relatif stabil dari tahun ke tahun, karena perkembangan kenaikan ekspor seiring dengan peningkatan PMTB. Rasio terendah terjadi pada tahun 2012, sebesar 1,15. Nilai ini menurun dibanding rasio tahun 2011 sebesar 1,20. Penurunan diantaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor).

Tabel 22. Rasio Ekspor terhadap PMTB Tahun 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	214 844,44	238 936,07	260 959,26	305 627,18	339 604,46
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	175 032,48	198 421,41	227 585,70	242 163,56	273 585,23
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,23	1,20	1,15	1,26	1,24

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

F. PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh luar negeri (termasuk produk dari provinsi lain). Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Rata-rata rasio PDRB terhadap impor tahun 2010 - 2014 sebesar 2,41 dan relatif stabil dari tahun ke tahun. Hal ini memperlihatkan peningkatan PDRB seiring dengan peningkatan impor. Peningkatan rasio menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor.

Tabel 23. Rasio PDRB terhadap Impor Tahun 2010 – 2014

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB)					
(Miliar Rp)	623 224,62	692 561,63	754 529,44	832 953,58	925 662,69
Total Impor (ADHB)					
(Miliar Rp)	221 427,89	270 208,21	332 019,93	372 075,35	394 854,44
Rasio PDRB terhadap Impor	2,81	2,56	2,27	2,24	2,35

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

G. KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar wilayah (luar negeri dan provinsi lain), dengan rentang 26 - 30 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 70 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 845 triliun (2010) menjadi sebesar 1.320 triliun rupiah (2014).

Tabel 24. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Tahun 2010 – 2014

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Total Penyediaan</u> PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	623 224,62	692 561,63	754 529,44	832 953,58	925 662,69
%	(73,78)	(71,93)	(69,44)	(69,12)	(79,46)
Total nilai Impor ADHB (Miliar Rp)	221 427,89	270 208,21	332 019,93	372 075,35	394 654,44
%	(26,22)	(28,07)	(30,56)	(30,88)	(29,89)
<u>Total Permintaan Akhir</u> ¹⁶ (Miliar Rp)	844 652,51	962 769,84	1 086 549,37	1 205 028,93	1 320 317,13
%	(100,00)	(100,00)	(100,00%)	(100,00)	(100,00)

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹⁶Termasuk diskrepansi statistik

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 623 triliun rupiah (2010); 693 triliun rupiah (2011); 754 triliun rupiah (2012); 833 triliun rupiah (2013); dan 926 triliun rupiah (2014). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 221 triliun rupiah (2010); 270 triliun rupiah (2011); 332 triliun rupiah (2012); 372 triliun rupiah (2013); dan 395 triliun rupiah (2014).

H. NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Selama periode 2010 - 2014, posisi perdagangan barang dan jasa provinsi Jawa Tengah dengan luar negeri dan antar provinsi, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa provinsi Jawa Tengah selalu dalam posisi defisit. Nilai ekspor yang lebih kecil dari impor menyebabkan adanya aliran devisa keluar, yang dalam konteks lain disebut sebagai “hutang luar negeri”. Defisit perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang terjadi antara tahun 2010 sampai dengan 2014 tercatat masing-

masing sebesar 6,58 triliun rupiah (2010), 31,27 triliun rupiah (2011), 71,06 triliun rupiah (2012), 66,45 triliun rupiah (2013) dan 55,05 triliun rupiah (2014).

**Tabel 25. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	214 844,44	238 936,07	260 959,26	305 627,18	339 604,46
Nilai Impor (ADHB)(Miliar Rp)	221 427,89	370 208,21	332 019,93	372 075,35	394 654,44
Net ekspor (X - M) (Miliar Rp)	-6 583,45	-31 272,14	-71 060,67	-66 448,17	-55 049,98
Rasio ekspor thdp Impor	0,97	0,88	0,79	0,82	0,86

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2010-2014. Selama lima tahun terakhir rata-rata rasio sebesar 0,87, dan rasio terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 0,79, dimana pada tahun ini terjadi defisit perdagangan terbesar.

I. RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d +1 ($-1 < RPI < +1$). Jika RPI berkisar antara minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

Dari tabel berikut terlihat bahwa nilai ekspor luar negeri Jawa Tengah selalu lebih rendah dari nilai impornya. Meskipun ekspor selalu tumbuh setiap tahun, namun kenaikannya tidak secepat pertumbuhan impor. Nilai Rasio Perdagangan Internasional Jawa Tengah selalu bernilai negatif. Nilai negatif ini terus meningkat dari tahun ke tahun yang mengindikasikan kenaikan impor yang lebih cepat dibanding ekspor.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

**Tabel 27. Incremental Capital Output Ratio
Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	623 224,62	656 268,13	691 343,12	726 899,71	766 271,77
Perubahan (miliar rupiah)	35 858,47	33 043,51	35 074,99	35 556,59	39 372,06
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	175 032,48	187 096,82	202 328,21	211 220,46	220 009,44
ICOR	4,88	5,66	5,77	5,94	5,59

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan besaran ICOR meningkat dari sebesar 4,88 (2010) menjadi 5,59 (2014). Peningkatan nilai ICOR terjadi setiap tahun dari 2010 sampai 2013 dan menurun di 2014. Semakin tinggi nilai ICOR menunjukkan semakin besar kapital yang digunakan untuk dapat meningkatkan 1 unit nilai output.

BAB V

PENUTUP

<https://jateng.bps.go.id>

<https://jateng.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2010 - 2014 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi provinsi Jawa Tengah pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Nominal PDRB Jawa Tengah tahun 2014 adh Berlaku mencapai 925,66 triliun rupiah. Dari nilai sebesar itu sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir, yaitu konsumsi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah yang mencapai 73,47 persen dimana 64,03 persennya adalah konsumsi rumah tangga. Dengan peranan konsumsi rumah tangga yang sangat dominan, tidak dapat dipungkiri bahwa komponen ini adalah penopang dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,42 persen dan 2,55 persennya³ bersumber dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
3. Peranan investasi dalam perekonomian selalu merupakan *issue* yang menarik untuk diulas, karena investasi dalam bentuk kapital/modal fisik akan digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi yang keluarannya adalah output. Peranan investasi dalam PDRB Pengeluaran Jawa Tengah dapat didekati dari proporsi PMTB dalam PDRB. Proporsi PMTB ini berada pada kisaran 28-30 persen, atau dapat dikatakan peranan investasi dalam perekonomian Jawa Tengah hanya sekitar 30 persen saja.

Dari nilai ICOR Jawa Tengah yang terus meningkat dapat disimpulkan bahwa untuk menambah 1 unit ouput setiap tahun, investasi yang ditanamkan setiap tahunnya semakin besar.

³ Lihat Lampiran 7

4. PDRB Jawa Tengah 2014 baru sanggup memenuhi 79,46 persen dari total permintaan akhir, sehingga kekurangan *supply* diperoleh dari impor. Impor yang dimaksud disini adalah impor dari luar negeri maupun dari provinsi lain. Peranan impor dalam perekonomian Jawa Tengah cukup besar dan nilainya meningkat dari tahun ke tahun.
5. Nilai impor Jawa Tengah lebih besar dari nilai eksportnya, sehingga setiap tahun terjadi defisit neraca perdagangan. Namun demikian defisit ini semakin mengecil, tahun 2012 defisit sebesar 71,06 triliun, tahun 2013 sebesar 66,45 triliun dan tahun 2014 sebesar 55,05 triliun rupiah.

Apabila dicermati lebih jauh, sumber defisit pada neraca perdagangan Jawa Tengah berasal dari ekspor-impor luar negeri, dimana pada tahun 2014 nilai impor luar negeri mencapai 2,63 kali nilai ekspor luar negeri. Untuk perdagangan antar provinsi, ekspor Jawa Tengah masih lebih besar dari nilai impornya sehingga net ekspor antar provinsi selalu positif (surplus).

6. Dari seluruh data, indikator dan ulasan yang ditampilkan dalam publikasi ini dapat dimanfaatkan oleh para pengguna data untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan, evaluasi dan berbagai analisis ekonomi lainnya. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, juga dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
7. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan disini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Jawa Tengah terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

LAMPIRAN

<https://jateng.bps.go.id>

<https://jateng.bps.go.id>

**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Pengeluaran**
(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	389 637 550,12	429 912 439,03	474 886 733,82	534 427 983,59	592 695 598,09
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	160 894 183,16	173 216 519,90	189 150 413,34	211 412 115,18	227 913 324,98
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	18 292 766,81	20 279 322,82	20 437 477,75	21 091 871,22	22 954 161,98
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	48 942 454,28	54 352 562,92	60 189 524,93	67 229 145,11	75 942 061,61
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	30 732 597,90	33 337 852,04	36 770 554,11	39 496 943,96	44 040 386,25
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	94 366 336,92	108 272 749,30	123 134 931,03	145 391 019,13	164 249 774,84
1.f. Hotel dan Restoran	30 016 090,32	32 264 934,81	35 435 850,18	39 556 798,04	46 601 709,74
1.g. Lainnya	6 393 120,73	8 188 467,24	9 767 982,47	10 250 090,96	10 994 178,70
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6 449 527,79	6 968 242,67	7 936 191,85	9 260 133,55	10 773 169,95
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	49 467 504,64	55 282 980,32	61 581 493,37	69 276 181,51	76 604 179,94
3.a. Konsumsi Kolektif	24 480 662,59	27 041 481,97	29 973 960,32	34 585 175,81	37 379 627,29
3.b. Konsumsi Individu	24 986 842,05	28 241 498,35	31 607 533,05	34 691 005,70	39 224 552,65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	175 032 483,21	198 421 408,64	227 585 695,26	242 163 565,82	273 585 229,61
4.a. Bangunan	153 501 451,77	169 773 747,30	189 641 502,10	201 050 603,80	230 357 921,06
4.b. Non-Bangunan	21 531 031,45	28 647 661,34	37 944 193,16	41 112 962,02	43 227 308,55
5. Perubahan Inventori	9 221 006,01	33 248 696,17	53 599 995,05	44 273 887,22	27 054 492,95
6. Ekspor Luar Negeri	43 652 537,56	51 428 480,33	56 418 973,46	70 362 204,89	83 686 747,78
6.a. Barang	42 333 417,43	49 929 536,61	54 602 520,19	68 491 762,69	82 143 104,93
6.b. Jasa	1 319 120,13	1 498 943,72	1 816 453,27	1 870 442,20	1 543 642,85
7. Impor Luar Negeri	97 675 338,00	126 705 978,16	146 745 409,74	186 800 827,72	220 421 202,37
7.a. Barang	94 790 888,24	123 181 010,30	142 795 005,70	181 733 888,60	214 880 713,80
7.b. Jasa	2 884 449,76	3 524 967,86	3 950 404,04	5 066 939,12	5 540 488,57
8. Net Ekspor Antar Daerah	47 439 350,00	44 005 358,44	19 265 762,99	49 990 450,24	81 684 476,27
8.a. Ekspor	171 191 905,02	187 507 589,66	204 540 285,28	235 264 972,54	255 917 716,62
8.b. Impor	123 752 555,02	143 502 231,22	185 274 522,29	185 274 522,29	174 233 240,35
PDRB	623 224 621,33	692 561 627,45	754 529 436,05	832 953 579,11	925 662 692,21

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Pengeluaran
(Juta Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	389 637 550,12	408 124 841,47	427 335 440,12	445 644 952,24	464 155 193,51
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	160 894 183,16	161 747 233,33	163 317 478,26	165 403 362,30	167 329 100,95
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	18 292 766,81	18 892 610,96	19 837 845,61	20 590 769,11	21 529 076,43
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	48 942 454,28	51 643 983,87	54 461 331,06	57 285 565,63	60 838 966,66
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	30 732 597,90	32 468 817,66	34 264 633,52	36 150 903,83	37 583 817,20
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	94 366 336,92	104 804 504,30	114 333 573,20	122 908 183,90	130 449 194,50
1.f. Hotel dan Restoran	30 016 090,32	30 841 331,66	32 524 748,78	33 959 533,44	36 592 259,10
1.g. Lainnya	6 393 120,73	7 726 359,69	8 595 829,69	9 346 634,03	9 832 778,67
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6 449 527,79	6 734 342,47	7 126 943,29	7 640 855,67	8 299 374,14
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	49 467 504,64	50 925 202,34	52 571 852,42	55 431 416,52	56 904 037,72
3.a. Konsumsi Kolektif	24 480 662,59	25 028 440,02	25 493 055,40	26 926 143,89	27 827 628,01
3.b. Konsumsi Individu	24 986 842,05	25 896 762,32	27 078 797,02	28 505 272,63	29 076 409,71
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	175 032 483,21	187 096 821,17	202 328 210,65	211 220 465,24	220 009 443,37
4.a. Bangunan	153 501 451,77	158 676 654,40	165 933 881,00	174 316 694,70	185 636 014,30
4.b. Non-Bangunan	21 531 031,45	28 420 166,77	36 394 329,65	36 903 770,54	34 373 429,07
5. Perubahan Inventori	9 221 006,01	35 727 932,39	36 462 121,82	21 017 823,65	16 261 492,29
6. Ekspor Luar Negeri	43 652 537,56	49 680 050,23	53 707 483,11	61 923 620,41	67 834 650,08
6.a. Barang	42 333 417,43	48 221 297,52	52 032 286,44	60 389 208,40	66 715 666,98
6.b. Jasa	1 319 120,13	1 458 752,71	1 675 196,67	1 534 412,01	1 118 983,10
7. Impor Luar Negeri	97 675 338,00	105 571 105,10	112 615 212,34	127 813 413,14	118 498 481,18
7.a. Barang	94 790 888,24	102 022 829,60	108 978 065,30	123 711 131,20	114 595 151,90
7.b. Jasa	2 884 449,76	3 548 275,50	3 637 147,04	4 102 281,94	3 903 329,28
8. Net Ekspor Antar Daerah	47 439 350,00	23 550 044,95	24 426 276,89	51 833 985,79	51 306 061,34
8.a. Ekspor	171 191 905,02	156 050 867,51	176 321 155,64	194 305 430,17	183 377 352,00
8.b. Impor	123 752 555,02	132 500 822,56	151 894 878,75	142 471 444,38	132 071 290,66
PDRB	623 224 621,33	656 268 129,91	691 343 115,96	726 899 706,38	766 271 771,27

*angka sementara

**angka sangat sementara

**Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	62,52	62,08	62,94	64,16	64,03
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	25,82	25,01	25,07	25,38	24,62
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,94	2,93	2,71	2,53	2,48
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,85	7,85	7,98	8,07	8,20
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,93 15,14	4,81 15,63	4,87 16,32	4,74 17,45	4,76 17,74
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,82	4,66	4,70	4,75	5,03
1.f. Hotel dan Restoran	1,03	1,18	1,29	1,23	1,19
1.g. Lainnya					
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,03	1,01	1,05	1,11	1,16
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,94	7,98	8,16	8,32	8,28
3.a. Konsumsi Kolektif	3,93	3,90	3,97	4,15	4,04
3.b. Konsumsi Individu	4,01	4,08	4,19	4,16	4,24
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,08	28,65	30,16	29,07	29,56
4.a. Bangunan	24,63	24,51	25,13	24,14	24,89
4.b. Non-Bangunan	3,45	4,14	5,03	4,94	4,67
5. Perubahan Inventori	1,48	4,80	7,10	5,32	2,92
6. Ekspor Luar Negeri	7,00	7,43	7,48	8,45	9,04
6.a. Barang	6,79	7,21	7,24	8,22	8,87
6.b. Jasa	0,21	0,22	0,24	0,22	0,17
7. Impor Luar Negeri	15,67	18,30	19,45	22,43	23,81
7.a. Barang	15,21	17,79	18,93	21,82	23,21
7.b. Jasa	0,46	0,51	0,52	0,61	0,60
8. Net Ekspor Antar Daerah	7,61	6,35	2,55	6,00	8,82
8.a. Ekspor	27,47	27,07	27,11	28,24	27,65
8.b. Impor	19,86	20,72	24,55	22,24	18,82
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*angka sementara

**angka sangat sementara

**Lampiran 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	62,52	62,19	61,81	61,31	60,57
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	25,82	24,65	23,62	22,75	21,84
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,94	2,88	2,87	2,83	2,81
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,85	7,87	7,88	7,88	7,94
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,93	4,95	4,96	4,97	4,90
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	15,14	15,97	16,54	16,91	17,02
1.f. Hotel dan Restoran	4,82	4,70	4,70	4,67	4,78
1.g. Lainnya	1,03	1,18	1,24	1,29	1,28
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,03	1,03	1,03	1,05	1,08
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,94	7,76	7,60	7,63	7,43
3.a. Konsumsi Kolektif	3,93	3,81	3,69	3,70	3,63
3.b. Konsumsi Individu	4,01	3,95	3,92	3,92	3,79
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,08	28,51	29,27	29,06	28,71
4.a. Bangunan	24,63	24,18	24,00	23,98	24,23
4.b. Non-Bangunan	3,45	4,33	5,26	5,08	4,49
5. Perubahan Inventori	1,48	5,44	5,27	2,89	2,12
6. Ekspor Luar Negeri	7,00	7,57	7,77	8,52	8,85
6.a. Barang	6,79	7,35	7,53	8,31	8,71
6.b. Jasa	0,21	0,22	0,24	0,21	0,15
7. Impor Luar Negeri	15,67	16,09	16,29	17,58	15,46
7.a. Barang	15,21	15,55	15,76	17,02	14,95
7.b. Jasa	0,46	0,54	0,53	0,56	0,51
8. Net Ekspor Antar Daerah	7,61	3,59	3,53	7,13	6,70
8.a. Ekspor	27,47	23,78	25,50	26,73	23,93
8.b. Impor	19,86	20,19	21,97	19,60	17,24
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^{*)} angka sementara

^{**)} angka sangat sementara

**Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	-	10,34	10,46	12,54	10,90
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	-	7,66	9,20	11,77	7,81
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	-	10,86	0,78	3,20	8,83
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-	11,05	10,74	11,70	12,96
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	-	8,48	10,30	7,41	11,50
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-	14,74	13,73	18,07	12,97
1.f. Hotel dan Restoran	-	7,49	9,83	11,63	17,81
1.g. Lainnya	-	28,08	19,29	4,94	7,26
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-	8,04	13,89	16,68	16,34
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-	11,76	11,39	12,50	10,58
3.a. Konsumsi Kolektif	-	10,46	10,84	15,38	8,08
3.b. Konsumsi Individu	-	13,03	11,92	9,76	13,07
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-	13,36	14,70	6,41	12,98
4.a. Bangunan	-	10,60	11,70	6,02	14,58
4.b. Non-Bangunan	-	33,05	32,45	8,35	5,14
5. Perubahan Inventori	-	260,58	61,21	-17,40	-38,89
6. Ekspor Luar Negeri	-	17,81	9,70	24,71	18,94
6.a. Barang	-	17,94	9,36	25,44	19,93
6.b. Jasa	-	13,63	21,18	2,97	-17,47
7. Impor Luar Negeri	-	29,72	15,82	27,30	18,00
7.a. Barang	-	29,95	15,92	27,27	18,24
7.b. Jasa	-	22,21	12,07	28,26	9,35
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-7,24	-56,22	159,48	63,40
8.a. Ekspor	-	9,53	9,08	15,02	8,78
8.b. Impor	-	15,96	29,11	0,00	-5,96
PDRB	-	11,13	8,95	10,39	11,13

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	-	4,74	4,71	4,28	4,15
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	-	0,53	0,97	1,28	1,16
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	-	3,28	5,00	3,80	4,56
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-	5,52	5,46	5,19	6,20
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	-	5,65	5,53	5,51	3,96
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-	11,06	9,09	7,50	6,14
1.f. Hotel dan Restoran	-	2,75	5,46	4,41	7,75
1.g. Lainnya	-	20,85	11,25	8,73	5,20
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-	4,42	5,83	7,21	8,62
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-	2,95	3,23	5,44	2,66
3.a. Konsumsi Kolektif	-	2,24	1,86	5,62	3,35
3.b. Konsumsi Individu	-	3,64	4,56	5,27	2,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-	6,89	8,14	4,39	4,16
4.a. Bangunan	-	3,37	4,57	5,05	6,49
4.b. Non-Bangunan	-	32,00	28,06	1,40	-6,86
5. Perubahan Inventori	-	287,46	2,05	-42,36	-22,63
6. Ekspor Luar Negeri	-	13,81	8,11	15,30	9,55
6.a. Barang	-	13,91	7,90	16,06	10,48
6.b. Jasa	-	10,59	14,84	-8,40	-27,07
7. Impor Luar Negeri	-	8,08	6,67	13,50	-7,29
7.a. Barang	-	7,63	6,82	13,52	-7,37
7.b. Jasa	-	23,01	2,50	12,79	-4,85
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-50,36	3,72	112,21	-1,02
8.a. Ekspor	-	-8,84	12,99	10,20	-5,62
8.b. Impor	-	7,07	14,64	-6,20	-7,30
PDRB	-	5,30	5,34	5,14	5,42

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 7. Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
menurut Pengeluaran
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	-	2,97	2,93	2,65	2,55
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	-	0,14	0,24	0,30	0,26
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	-	0,10	0,14	0,11	0,13
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-	0,43	0,43	0,41	0,49
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	-	0,28	0,27	0,27	0,20
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-	1,67	1,45	1,24	1,04
1.f. Hotel dan Restoran	-	0,13	0,26	0,21	0,36
1.g. Lainnya	-	0,21	0,13	0,11	0,07
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-	0,05	0,06	0,07	0,09
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-	0,23	0,25	0,41	0,20
3.a. Konsumsi Kolektif	-	0,09	0,07	0,21	0,12
3.b. Konsumsi Individu	-	0,15	0,18	0,21	0,08
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-	1,94	2,32	1,29	1,21
4.a. Bangunan	-	0,83	1,11	1,21	1,56
4.b. Non-Bangunan	-	1,11	1,22	0,07	-0,35
5. Perubahan Inventori	-	4,25	0,11	-2,23	-0,65
6. Ekspor Luar Negeri	-	0,97	0,61	1,19	0,81
6.a. Barang	-	0,94	0,58	1,21	0,87
6.b. Jasa	-	0,02	0,03	-0,02	-0,06
7. Impor Luar Negeri	-	1,27	1,07	2,20	-1,28
7.a. Barang	-	1,16	1,06	2,13	-1,25
7.b. Jasa	-	0,11	0,01	0,07	-0,03
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-3,83	0,13	3,96	-0,07
8.a. Ekspor	-	-2,43	3,09	2,60	-1,50
8.b. Impor	-	1,40	2,96	-1,36	-1,43
PDRB	-	5,30	5,34	5,14	5,42

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 8. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun 2010=100)
menurut Pengeluaran
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	100,00	105,34	111,13	119,92	127,69
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	100,00	107,09	115,82	127,82	136,21
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	107,34	103,02	102,43	106,62
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	100,00	105,24	110,52	117,36	124,82
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	102,68	107,31	109,26	117,18
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	103,31	107,70	118,29	125,91
1.f. Hotel dan Restoran	100,00	104,62	108,95	116,48	127,35
1.g. Lainnya	100,00	105,98	113,64	109,67	111,81
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	103,47	111,35	121,19	129,81
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	100,00	108,56	117,14	124,98	134,62
3.a. Konsumsi Kolektif	100,00	108,04	117,58	128,44	134,33
3.b. Konsumsi Individu	100,00	109,05	116,72	121,70	134,90
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	100,00	106,05	112,48	114,65	124,35
4.a. Bangunan	100,00	106,99	114,29	115,34	124,09
4.b. Non-Bangunan	100,00	100,80	104,26	111,41	125,76
5. Perubahan Inventori	100,00	93,06	147,00	210,65	166,37
6. Ekspor Luar Negeri	100,00	103,52	105,05	113,63	123,37
6.a. Barang	100,00	103,54	104,94	113,42	123,12
6.b. Jasa	100,00	102,76	108,43	121,90	137,95
7. Impor Luar Negeri	100,00	120,02	130,31	146,15	186,01
7.a. Barang	100,00	120,74	131,03	146,90	187,51
7.b. Jasa	100,00	99,34	108,61	123,52	141,94
8. Net Ekspor Antar Daerah	100,00	186,86	78,87	96,44	159,21
8.a. Ekspor	100,00	120,16	116,00	121,08	139,56
8.b. Impor	100,00	108,30	121,98	130,04	131,92
PDRB	100,00	105,53	109,14	114,59	120,80

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 9. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Pengeluaran (Tahun 2010=100)**
(Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013^{*)}	2014^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	100,00	110,34	121,88	137,16	152,11
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	100,00	107,66	117,56	131,40	141,65
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	110,86	111,72	115,30	125,48
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	100,00	111,05	122,98	137,36	155,17
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	108,48	119,65	128,52	143,30
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	114,74	130,49	154,07	174,06
1.f. Hotel dan Restoran	100,00	107,49	118,06	131,79	155,26
1.g. Lainnya	100,00	128,08	152,79	160,33	171,97
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	108,04	123,05	143,58	167,04
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	100,00	111,76	124,49	140,04	154,86
3.a. Konsumsi Kolektif	100,00	110,46	122,44	141,28	152,69
3.b. Konsumsi Individu	100,00	113,03	126,50	138,84	156,98
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	100,00	113,36	130,02	138,35	156,31
4.a. Bangunan	100,00	110,60	123,54	130,98	150,07
4.b. Non-Bangunan	100,00	133,05	176,23	190,95	200,77
5. Perubahan Inventori	100,00	360,58	581,28	480,14	293,40
6. Ekspor Luar Negeri	100,00	117,81	129,25	161,19	191,71
6.a. Barang	100,00	117,94	128,98	161,79	194,04
6.b. Jasa	100,00	113,63	137,70	141,79	117,02
7. Impor Luar Negeri	100,00	129,72	150,24	191,25	225,67
7.a. Barang	100,00	129,95	150,64	191,72	226,69
7.b. Jasa	100,00	122,21	136,96	175,66	192,08
8. Net Ekspor Antar Daerah	100,00	92,76	40,61	105,38	172,19
a.. Ekspor	100,00	109,53	119,48	137,43	149,49
b. Impor	100,00	115,96	149,71	149,71	140,79
PDRB	100,00	111,13	121,07	133,65	148,53

^{*)} angka sementara

^{**)} angka sangat sementara

**Lampiran 10. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (Tahun 2010=100)
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013^{*)}	2014^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	100,00	104,74	109,68	114,37	119,12
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	100,00	100,53	101,51	102,80	104,00
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	103,28	108,45	112,56	117,69
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	100,00	105,52	111,28	117,05	124,31
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	105,65	111,49	117,63	122,29
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	111,06	121,16	130,25	138,24
1.f. Hotel dan Restoran	100,00	102,75	108,36	113,14	121,91
1.g. Lainnya	100,00	120,85	134,45	146,20	153,80
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	104,42	110,50	118,47	128,68
3. Konsumsi Pemerintah	100,00	102,95	106,28	112,06	115,03
3.a. Konsumsi Kolektif	100,00	102,24	104,14	109,99	113,67
3.b. Konsumsi Individu	100,00	103,64	108,37	114,08	116,37
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	100,00	106,89	115,59	120,68	125,70
4.a. Bangunan	100,00	103,37	108,10	113,56	120,93
4.b. Non-Bangunan	100,00	132,00	169,03	171,40	159,65
5. Perubahan Inventori	100,00	387,46	395,42	227,93	176,35
6. Ekspor Luar Negeri	100,00	113,81	123,03	141,86	155,40
a. Barang	100,00	113,91	122,91	142,65	157,60
b. Jasa	100,00	110,59	126,99	116,32	84,83
7. Impor Luar Negeri	100,00	108,08	115,30	130,86	121,32
a. Barang	100,00	107,63	114,97	130,51	120,89
b. Jasa	100,00	123,01	126,10	142,22	135,32
8. Net Ekspor Antar Daerah	100,00	49,64	51,49	109,26	108,15
a. Ekspor	100,00	91,16	103,00	113,50	107,12
b. Impor	100,00	107,07	122,74	115,13	106,72
PDRB	100,00	105,30	110,93	116,64	122,95

^{*)} angka sementara

^{**)} angka sangat sementara

DAFTAR PUSTAKA

<https://jateng.bps.go.id>

<https://jateng.bps.go.id>

1. Badan Pusat Statistik, *Sistem Neraca Nasional 2008*, Jakarta, 2013.
2. _____, *Pedoman Penyusunan PDRB Kabupaten/Kota Tahun Dasar 2010 Menurut Pengeluaran*, Jakarta, 2014.
3. _____, *Booklet Perubahan Tahun Dasar PDB Berbasis SNA 2008*, Jakarta, 2014.
4. _____, *Produk Domestik Bruto menurut Penggunaan 2008-2013*, Jakarta, 2014
5. BPS Provinsi Jawa Tengah, *Tabel Input Output Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
6. _____, *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
7. _____, *Beberapa Indikator Makro Sosial Ekonomi Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
8. _____, *Jawa Tengah dalam Angka*, berbagai seri, Semarang.
9. _____, *Statistik Air Bersih Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
10. _____, *Statistik Impor Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
11. _____, *Statistik Industri Manufaktur Besar Sedang Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
12. _____, *Statistik Ekspor Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://jateng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp : (024) 8412802-8412804, Fax : (024) 8311195

Homepage : <http://jateng.bps.go.id>, e-mail : bps3300@bps.go.id

ISBN 978-602-0916-36-1



9 786020 916361